



# LAPORAN KINERJA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2022



INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami segenap jajaran pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada kami selaku satuan kerja (satker) pelaksana BPK RI selama Tahun 2022, sehingga kami juga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Laporan ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan kinerja pada Tahun Anggaran 2022.

Pengukuran kinerja dilakukan sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) BPK Tahun 2020 s.d. 2024, dimana setiap tahun satuan kerja menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas guna mencapai kinerja yang diharapkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2022 telah ditandatangani bersama antara Tortama KN VI dengan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2022.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya maksimal dan akan senantiasa melakukan evaluasi dan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja satuan kerja serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Demikian laporan ini, semoga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, kendala yang dihadapi untuk memperoleh masukan dari para pihak terkait dan dapat memberi manfaat dalam pengambilan keputusan, serta dapat menjadi umpan balik bagi seluruh Pejabat Struktural dan para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri di dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2023

Kepala Perwakilan



**Binsar Karyanto P.**  
**NIP 197006231999031003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah .....	2
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah .....	5
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah .....	8
E. Isu Strategis.....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>12</b>
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah .	12
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>15</b>
A. Hasil Evaluasi AKIP.....	15
B. Capaian Kinerja .....	12
C. Analisis Efisiensi .....	48
D. Perubahan Budaya Kerja .....	49
E. Realisasi Anggaran .....	50
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam mengukur transparansi dan akuntabilitas, pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target- target kinerja maka setiap Kementerian Negara/Lembaga/pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Amanat untuk menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain menyatakan bahwa laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD berdasarkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh tiap-tiap entitas pelaporan dan/atau entitas akuntansi.

Secara teknis, ketentuan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja Instansi pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dalam mencapai misi serta tujuan organisasi.

Badan Pemeriksa Keuangan menyusun lebih lanjut ketentuan tentang pelaporan kinerja berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal

BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja Pada Unit–Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan yang antara lain mengatur bahwa setiap satuan kerja Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk di dalamnya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu satuan kerja pada Auditorat Keuangan Negara VI.

Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

## **B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu di antaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI yang membawahi Auditorat dan Perwakilan BPK di wilayah Indonesia Timur. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana (OTKP) BPK, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,

kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

## C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh Sekretariat sebagai unsur penunjang pelaksana tugas dan Subauditorat sebagai unsur pelaksana tugas pemeriksaan dengan susunan organisasi seperti disajikan pada gambar berikut.

Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah



Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

### 1. Subauditorat Sulawesi Tengah I

Subauditorat Sulawesi Tengah I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli,

Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara, menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK; pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

## **2. Subauditorat Sulawesi Tengah II**

Subauditorat Sulawesi Tengah II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama

BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

### **3. Sekretariat Perwakilan**

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

#### **a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan**

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

**b. Subbagian Sumber Daya Manusia**

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

**c. Subbagian Keuangan**

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

**d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi**

Subbagian Umum dan teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

**e. Subbagian Hukum**

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

**4. Pejabat Fungsional Pemeriksa**

Jabatan fungsional pemeriksa merupakan kelompok pejabat fungsional pemeriksa yang terdiri dari Pemeriksa Madya, Pemeriksa Muda, dan Pemeriksa Pertama. Pejabat fungsional pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Perwakilan dan/atau Badan.

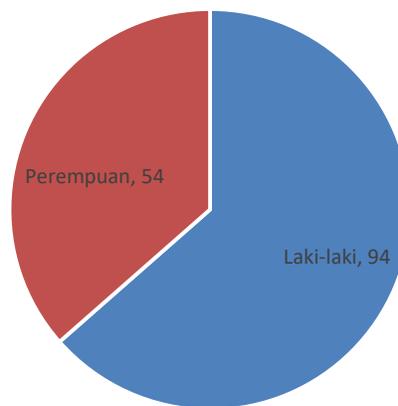
**D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**

Sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2022 terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya keuangan berupa anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2022.

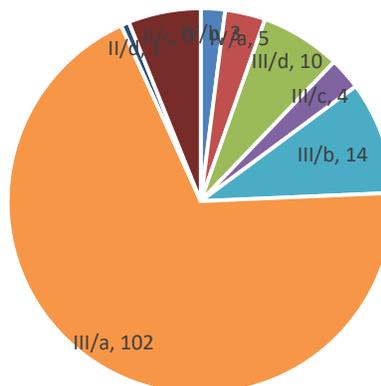
## 1. SDM

Pada Desember 2022, SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 169 orang yang terdiri atas 9 Pejabat Struktural, 66 Pejabat Fungsional Pemeriksa, 3 Pejabat Fungsional lainnya, 12 Jabatan Pelaksana, 58 CPNS, dan 21 Tenaga Tidak Tetap. Berikut disajikan komposisi SDM berdasarkan indikator tertentu sebagai berikut.

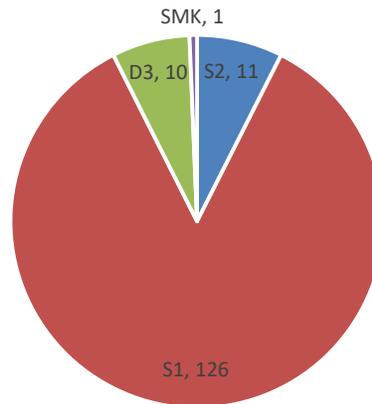
**Jmlh Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin**



**Jmlh Pegawai berdasarkan Golongan**



### Jmlh Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan



## 2. Keuangan

Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola DIPA sebesar Rp22.116.092.000,00. Anggaran tersebut melekat pada satu program, yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 – Anggaran Tahun 2022 berdasarkan KRO**

(dalam rupiah)

No.	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Anggaran
1.	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	11.209.507.000,00
2.	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	796.754.000,00
3.	FAF	Pemeriksaan Keuangan Negara	10.109.831.000,00
	<b>Jumlah</b>		<b>22.116.092.000,00</b>

## E. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tupoksinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi tantangan strategis antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pemeriksa pada jenjang Muda dan Madya, serta pegawai pada unit kesekretariatan.  
Pemeriksa jenjang utama sama sekali belum ada yang mengisi dan untuk pemeriksa madya dan pemeriksa muda baru terpenuhi sebanyak masing-masing 33% dan 30%. Namun demikian untuk

pemeriksa pertama dengan mengasumsikan CPNS tahun 2022 seluruhnya lulus sebagai pemeriksa justru mengalami kelebihan sebanyak 36%. Kondisi diatas dapat mengakibatkan beberapa peran dalam penugasan ketua Tim diisi oleh jenjang jabatan dibawahnya.

Selain itu untuk pegawai penunjang pendukung di kesekretariatan tingkat pemenuhannya tertinggi hanya 45% pada Subbagian Humas dan TU Kalan. Kondisi ini tentunya akan sangat mempengaruhi kinerja dan pelayanan

2. Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang rendah

Realisasi persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selama lima tahun terakhir (2017 - 2022) yang tidak pernah memenuhi target menjadi tantangan tersendiri bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong entitas berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

3. Pola mutasi yang belum jelas

Berdasarkan besetting per 31 Desember 2022 didapatkan informasi bahwa sebanyak 10 pejabat fungsional pemeriksa yang telah memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun dan belum tahu akan dipindah. Kondisi tersebut salah satunya dipicu oleh pola mutasi yang belum sesuai ketentuan.

4. Anggaran untuk kantor perwakilan yang masih kurang

Beberapa anggaran seperti anggaran pemeliharaan gedung dan kantor, pemeliharaan mesin, belanja modal belum sesuai kebutuhan. Kondisi tersebut mengakibatkan kualitas sarana dan prasarana kurang sesuai.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**

Rencana strategis (Renstra) BPK 2020 s.d. 2024 menetapkan Visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja pada BPK RI di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI juga menetapkan visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis sebagai berikut:

##### **Visi**

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

##### **Misi**

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

##### **Nilai Dasar**

Integritas, Independensi, Profesionalisme.

##### **Tujuan Strategis**

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan Satker Eselon II menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 berupa Sasaran Kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ingin menjamin peningkatan mutu pemeriksaan atas

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang sesuai dengan standar. Melalui peningkatan mutu pemeriksaan, maka diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja BPK. Hasil pemeriksaan yang bermutu tinggi dapat menjadi sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis ini, area penyempurnaan difokuskan pada penyusunan metodeologi pemeriksaan yang kuat, peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara, dan peningkatan kualitas SDM pemeriksaan.

## B. Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

### 1. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Berikut 13 Indikator Kinerja Utama beserta target pencapaiannya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Utama  
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran & Anggaran		Indikator Kinerja Utama		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi:	Rp20.407.366.000	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	Rp8.585.723.000	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
• Meningkatkan layanan pemeriksaan	Rp11.821.643.000	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan

Sasaran Kegiatan, Sasaran & Anggaran	Indikator Kinerja Utama	Target
		(5,00)
	IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%

## 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2022

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan rencana aksi pelaksanaan perjanjian kinerja tahun 2022 yang dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target PK 2021	Rencana Pencapaian Kinerja			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</b>						
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	0%	40%	40%	100%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0%	0%	0%	100%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0%	0%	0%	100%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)				5,00
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)				A (88,00)
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	97%	97%	97%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	25%	50%	100%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)				3,80
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	60%	70%	80%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	99%	99%	99%	99%	99%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Hasil Evaluasi AKIP**

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Utama, Implementasi SAKIP Tahu 2021 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan nilai sebesar **86,53** dengan predikat **A (memuaskan)**. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan Tahun 2020 yang mendapatkan nilai sebesar **87,84** dan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 (88,00).

Terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam hasil evaluasi, Inspektorat Utama telah merekomendasikan beberapa perbaikan terhadap implementasi komponen SAKIP mendatang untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Menindaklanjuti hal-hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa kegiatan antara lain sebagai berikut.

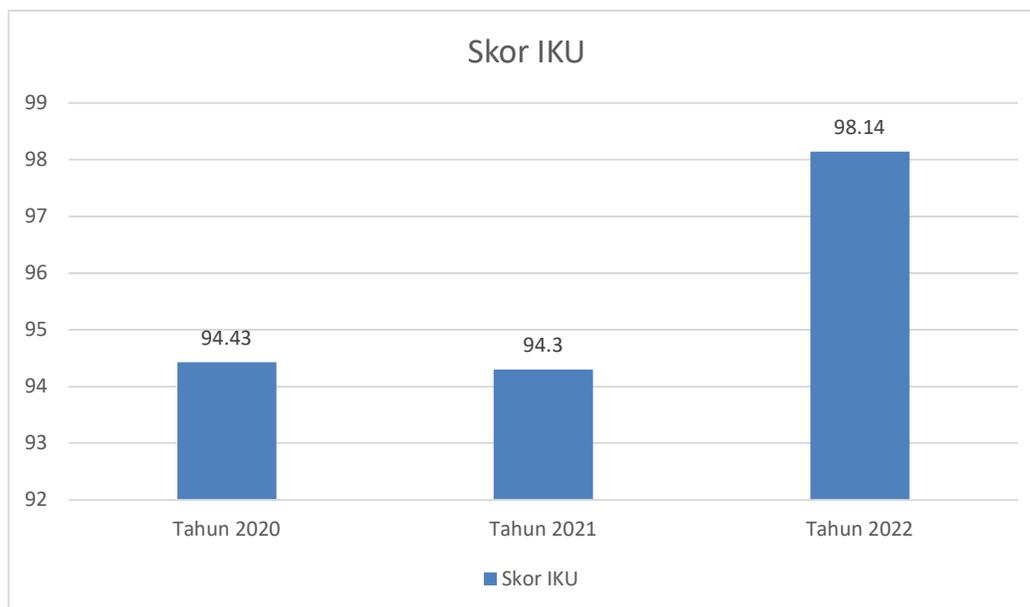
- a. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan:
  - 1) menyampaikan LAKIN kepada Direktorat PSMK secara tepat waktu;
  - 2) menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indicator kinerja; dan
  - 3) meningkatkan kualitas informasi mengenai pembandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra untuk seluruh indicator kinerja
- b. Meningkatkan kinerja sehingga beberapa target yang sebelumnya tidak tercapai / tidak lebih baik, dapat tercapai dan lebih baik dari capaian tahun sebelumnya

#### **B. Capaian Kinerja**

Selama Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. Mendorong pemenuhan *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) dalam pelaksanaan 27 pemeriksaan;
2. Mendorong pelaksanaan 27 pemeriksaan pada tahun 2022 agar menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan harapan penugasan
3. Melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lajut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK secara rutin (semesteran) dan pemanfaatan penuh SIPTL dalam prosesnya;
4. Berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik nasional pada 2 tema pemeriksaan dengan jumlah 2 tim pemeriksaan;
5. Berpartisipasi dalam pemeriksaan tematik local pada 1 tema pemeriksaan dengan jumlah 4 tim pemeriksaan;
6. Melakukan internalisasi/penguatan nilai-nilai dasar BPK melalui berbagai kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, seperti pengarahan Kepala Perwakilan, dll;
7. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja sesuai dengan rekomendasi perbaikan Inspektorat Utama;
8. Mendorong pemanfaatan Aplikasi TI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
9. Melaksanakan penyusunan usulan *Best Practice*, penerapan/replikasi *Best Practice* yang sudah ada, serta mengadakan berbagai aktivitas manajemen pengetahuan
10. Melaksanakan dan mendorong pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai; dan
11. Optimalisasi anggaran dalam rangka pencapaian keluaran serta penambahan obyek pemeriksaan.

Pada Tahun 2022, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98,14. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar 94,3. Skor capaian kinerja menunjukkan tren yang dapat disajikan pada gambar berikut.



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir skor capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berfluktuasi. Pada Tahun 2020 skor kinerja yang diperoleh sebesar 94.43, namun pada Tahun 2021 skor turun menjadi 94,30. Hal tersebut dikarenakan terdapat empat target tahun berjalan yang tidak tercapai, dan terdapat delapan capaian kinerja tahun 2021 yang tidak lebih baik dari capaian kinerja tahun 2020. Pada tahun 2022, berdasarkan perhitungan mandiri, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah naik menjadi 98,14. Meskipun terdapat kenaikan jumlah target yang tidak tercapai dibandingkan tahun 2021, terdapat lima target IKU yang melampaui target yang ditetapkan, dan dua diantaranya adalah IKU Generik, sehingga persentase skor mengalami kenaikan cukup berpengaruh signifikan.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah diukur berdasarkan pencapaian atas 13 IKU yang disajikan pada tabel berikut

**Tabel Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83.33%	83.33
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100.00%	100.00
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	69.53%	92.71
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.30%	100.30

5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100.00%	100.00
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100.99%	100.99
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4.70	94.00
8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	86.53	98.33
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	94.41%	97.33
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	105.70%	105.70
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3.94	103.68
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100.00%	100.00
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	89.70%	101.93

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2022 dengan realisasi tiga tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Realisasi Tiga Tahun Terakhir**

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2020
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	83,33%	90,67%	71,43%
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	69.53%	69,47%	67,25%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100.30%	100.00%	100.00%
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100.99%	100.00%	100.00%
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	4,70	4,42	4,58
	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	86,53	87,84	83,72
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	94,41%	99,62%	99,62%
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	105.70%	0,00%	50,00%
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	3,94	3,89	3,66
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100,00%	100,00%	98,82%
	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	88%	89,70%	89,65%	93,37%

Selanjutnya, perbandingan realisasi tahun pelaporan dengan target lima tahun sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Perbandingan Realisasi Tahun Pelaporan dengan Target Lima Tahun**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Lima Tahun					Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	83,33%	83,33%
2.	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%
3.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	80%	80%	69.53%	86,91%
4.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100.30%	100,30%
5.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100,00%
6.	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100.99%	100,99%
7.	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4.70	94,00%
8.	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)	A (86,53)	96,09%
9.	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%	94.41%	94.41%
10.	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	105.70%	105.70%
11.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,85	3,90	3,95	4,00	3.94	98,50%
12.	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100,00%
13.	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	89%	89.70%	100,79%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

### **IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan**

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reuiu ltama.

Hasil QA dan QC (Sub IKU 1.1) merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). Kontribusi Sub IKU 1.1 adalah sebesar 40% dari Kumulatif penilaian IKU 1.

Hasil Evaluasi EPP (Sub IKU 1.2) merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Kontribusi Sub IKU 1.2 adalah sebesar 50% dari Kumulatif penilaian IKU 1.

Hasil Reviu Itama (Sub IKU 1.3) merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Kontribusi Sub IKU 1.3 adalah sebesar 10% dari Kumulatif penilaian IKU 1.

Tujuan dari IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan adalah untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 - 2024**

IKU. 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	71,43%	90,67%	83,33%		
Capaian	71,43%	90,67%	83,33%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			83,33%		

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 83,33% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 83,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Realisasi tersebut diperoleh dari:

- a. 100% Sub IKU 1.1 Hasil *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QA) atas 27 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.;

- b. 66,67% Sub IKU 1.2 Hasil Evaluasi EPP dimana tingkat konsistensi LHP bernilai 26,67% dan tingkat akurasi atas LHP bernilai 93,33% atas 15 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Semester I Tahun 2022;
- c. 100% Sub IKU 1.3 Hasil reviu Inspektorat Utama (Itama);

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, tingkat konsistensi LHP bernilai 73,33% sedangkan tingkat akurasi atas LHP bernilai 86,67% atas 15 pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di Semester I Tahun 2021. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan masih terdapat kesalahan yang ditemukan dalam LHP yang diterbitkan. Hasil Evaluasi EPP ini menggunakan konsep *Zero Defects* untuk meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pengukuran Sub IKU 1.2 ini tidak mentolerir adanya satu kesalahan atas akurasi dan konsistensi LHP yang jika ditemukan satu kesalahan maka hasil evaluasi EPP atas LHP tersebut akan bernilai 0%.

Untuk memperbaiki capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk secara intensif melakukan *cross review* antar tim pemeriksa serta tetap membentuk tim *cross review* dari pegawai penunjang/pendukung sehingga dapat memaksimalkan penilaian atas evaluasi akurasi dan konsistensi untuk setiap LHP yang diterbitkan.

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan telah mencapai 83,33% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

## **IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan**

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Tujuan dari Indikator ini adalah untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan

Hasil Pemeriksaan (LHP). Komponen penilaian yang digunakan adalah Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dan Jumlah LHP yang diterbitkan.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2020 - 2024**

IKU. 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,00%		

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh LHP yang diterbitkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan harapan penugasan yang tercantum dalam Program Pemeriksaan. LHP tersebut yaitu:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sigi Tahun 2021;
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala Tahun 2021;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun 2021;
- f. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2021;

- g. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021;
- h. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021;
- i. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Poso Tahun 2021;
- j. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021;
- k. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Tahun 2021;
- l. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2021;
- m. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;
- n. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021;
- o. LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
- p. LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Poso
- q. LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Donggala
- r. LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
- s. LHP Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

- t. LHP Kinerja atas Upaya Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Kabupaten Morowali
- u. LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Input Sistem Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Manusia Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli
- v. LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 s.d. Semester I 2022 Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Instansi Terkait Lainnya
- w. LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Melalui Kesiapsiagaan Bencana dan Pemulihan Pascabencana Tahun Anggaran 2019 s.d Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Sigi
- x. LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2020 s.d 2022 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
- y. LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Kredit pada PT Bank Sulteng Tahun 2020 s.d Semester I 2022
- z. LHP Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Palu
- aa. LHP Kinerja Terinci atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui aksi Pembentukan UKPBJ serta Implementasi E-Katalog dan E-Payment Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2021, juga tercapai sebesar 100%. Ketercapaian tersebut didukung oleh kerja keras seluruh tim pemeriksa untuk memenuhi harapan penugasan yang termuat dalam Program Pemeriksaan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya untuk terus dapat melaksanakan pemeriksaan sesuai program pemeriksaan (P2) sehingga penyusunan laporan hasil pemeriksaan juga sesuai dengan harapan penugasan BPK.

Realisasi IKU Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan telah mencapai 100% dari target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### **IKU 3 – Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan guna mendorong pelaksana BPK dalam merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas dan memberikan peningkatan pada operasional atau kinerja yang menggambarkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

Komponen penilaian IKU 3 ini adalah Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti, Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee. Pengukuran atas IKU ini adalah persentase jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti dan yang tidak dapat ditindaklanjuti menurut peraturan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang telah disampaikan kepada entitas dari seluruh hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu hingga per 31 Desember 2021 sesuai database EPP pada Aplikasi SMP.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil  
Pemeriksaan Tahun 2020 - 2024**

IKU. 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75,00%	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%
Realisasi	67,25%	69,47%	69,53%		
Capaian	89,67%	92,63%	92,71%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			86,91%		

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 adalah sebesar 69,53% dari target sebesar 75,00%, sehingga capaiannya sebesar 92,71%. Hal ini mengindikasikan bahwa belum adanya komitmen penuh dari Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan rekomendasi BPK. Realisasi tersebut diperoleh dari progress Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan s.d. Semester I Tahun 2022:

No	Status	Jumlah	Persentase
1	telah selesai ditindaklanjuti	8.926	<b>68,71%</b>
2	belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti	3.007	23,15%
3	belum ditindaklanjuti	951	7,32%
4	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	107	<b>0,82%</b>
	Jumlah	<b>12.991</b>	

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, capaian terhadap target hanya sebesar 92,63%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 92,71%. Ketercapaian tersebut disebabkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mendorong Pemerintah Daerah antara lain dengan secara rutin melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut dan penyediaan sarana berupa Aplikasi SIPTL, sehingga penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.

Meskipun demikian, terkait tidak tercapainya target tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengidentifikasi beberapa faktor penyebab antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya komitmen dari pimpinan entitas
- b. Kurangnya efektivitas fungsi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada masing-masing entitas dalam menyelesaikan rekomendasi BPK
- c. Fungsi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) belum bekerja dengan optimal
- d. Pemda cenderung hanya memfokuskan pada penyelesaian temuan yang bersifat pemulihan kerugian negara atau daerah. Sedangkan untuk tindak lanjut yang bersifat administratif seperti sanksi, perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan kurang mendapatkan perhatian
- e. Pemda cenderung memfokuskan tindak lanjut pada temuan tahun berjalan, kurang memberi perhatian pada temuan yang sudah lama

Untuk memperbaiki capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan tetap berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dengan mengevaluasi permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam memindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
- b. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya untuk meningkatkan koordinasi tim pemegang dosir TLRHP setiap entitas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah dengan pemerintah daerah melalui penyelenggaraan rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan secara semesteran dan akan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan percepatan pemutakhiran data TLRHP pada Aplikasi SiPTL yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan telah mencapai 86,91% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

#### **IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG.

IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional ini diukur melalui tiga Sub IKU yaitu Sub IKU 4.1 Realisasi Pemeriksaan Tematik Nasional, Sub IKU 4.2 Rencana Pemeriksaan yang Disusun Berdasarkan Tematik Nasional, dan Sub IKU 4.3 Alokasi Penambahan Skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh tiap-tiap satker pada setiap pemeriksaan tematik nasional.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020 - 2024**

IKU. 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

dalam Pemeriksaan Tematik Nasional					
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,30%		
Capaian	100,00%	100,00%	100,30%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,30%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2022 adalah sebesar 100,30% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, juga terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional. Hal ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Kota Palu; dan
- b. Pemeriksaan Kinerja Terinci atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui aksi Pembentukan UKPBJ serta Implementasi E-Katalog dan E-Payment Tahun Anggaran 2019 s.d Semester I 2022 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

Partisipasi terhadap dua pemeriksaan tematik nasional tersebut memberikan kontribusi alokasi tambahan skor sebesar 0,30.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh keinginan penuh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional, sehingga melalui pemeriksaan tematik nasional yang diikuti, diharapkan dapat memberikan hasil berupa gambaran kinerja Pemerintah Pusat dalam agenda pembangunan nasional dengan sudut pandang lain, dalam hal ini pada provinsi yang berbeda.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk kedepannya terus

berpartisipasi dalam Pemeriksaan Tematik Nasional lainnya, sesuai agenda dari BPK Pusat.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### **IKU 5 – Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Komponen yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 - 2024**

IKU. 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,00%		
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,00%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun terakhir belum pernah menerima permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Oleh karena kondisi tersebut, IKU ini dihitung sebagai IKU bonus dan secara umum realisasi tetap diperhitungkan sebesar 100%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada tahun 2021 juga tidak terdapat permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.

Namun demikian, untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk terus membuka layanan dan akses kepada para pemangku kepentingan terkait permohonan pemeriksaan melalui pemberian surat permintaan pemeriksaan ke BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat dilakukan kajian atas permintaan pemeriksaan tersebut untuk menilai efektivitas dan efisiensi, serta kebutuhan dan kelayakan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan telah sesuai dengan target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

## **IKU 6 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Komponen dalam penilaian IKU ini adalah Realisasi pemeriksaan tematik lokal dan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal ini diukur melalui tiga Sub IKU yaitu Sub IKU 6.1 Realisasi Pemeriksaan Tematik Lokal, Sub IKU 6.2 Rencana Pemeriksaan yang Disusun Berdasarkan Tematik Lokal, dan Sub IKU 6.3 Alokasi Penambahan Skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan. Alokasi penambahan skor dihitung oleh Direktorat PSMK dengan

memperhatikan jumlah dan jenjang peran pemeriksa yang dikontribusikan oleh tiap-tiap satker pada setiap pemeriksaan lokal.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 - 2024**

IKU. 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	100,00%	100,00%	100,99%		
Capaian	100,00%	100,00%	100,99%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,99%		

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2022 adalah sebesar 100,99% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, juga terlibat dalam pemeriksaan tematik lokal. Hal ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Poso
- b. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Donggala
- c. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una
- d. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 s.d. Triwulan III 2022 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

Partisipasi terhadap dua pemeriksaan tematik lokal tersebut memberikan kontribusi alokasi tambahan skor sebesar 0,99.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh harapan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tentang pentingnya menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk kedepannya terus terlibat dalam melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal lainnya.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

## **IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Pengembangan budaya integritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan dalam mewujudkan manfaat yang diinginkan, dimana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi. Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei adalah sebagai berikut:

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK dengan target yang ditetapkan sebesar 5,00 (sangat memuaskan).

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020 - 2024**

IKU. 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	4,58	4,42	4,70		
Capaian	91,60%	88,40%	94,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			94,00%		

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022 adalah sebesar 4,70 dari target sebesar 5,00, sehingga capaiannya sebesar 94,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kurangnya pemahaman pegawai tertentu terhadap Nilai Dasar BPK dan praktik implementasinya. Realisasi tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, capaian terhadap target hanya sebesar 88,40%, sedangkan pada tahun 2022 mencapai 94,00%. Ketercapaian tersebut disebabkan upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini manajemen untuk terus mendiseminasikan nilai-nilai dasar BPK melalui berbagai media. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam dan terimplementasikan khusus dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan.

Untuk memperbaiki capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan melakukan hal-hal antara lain melalui kegiatan pengarahan Kepala Perwakilan dan/atau para pejabat structural lainnya tentang pentingnya pengimplementasian nilai-nilai dasar BPK, melakukan sosialisasi implementasi nilai dasar BPK melalui acara Pengembangan Komunitas Unggulan, serta memberikan teladan yang baik untuk menjadi motivasi bagi pegawai agar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai dasar BPK baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan personal.

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK telah mencapai 94,00% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah

diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

### IKU 8 – Hasil Evaluasi AKIP

IKU 8 ini merupakan indikator untuk mengukur tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi BPK sebagai lembaga publik. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas atas kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 431/K/XIII.2/9/2012 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-Unit Pelaksana BPK, Perwakilan Provinsi Lampung wajib untuk menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- a) AA = Sangat Memuaskan (>90-100);
- b) A = Memuaskan (>80-90);
- c) BB = Sangat Baik (>70-80);
- d) B = Baik (>60-70);
- e) CC = Cukup (>50-60);
- f) C = Kurang (>30-50);
- g) D = Sangat Kurang (0-30).

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2024

IKU. 8 Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
Realisasi	83,72	87,84	86,53		
Capaian	97,35%	100,97%	98,33%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			96,09%		

Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 adalah A (86,53) dari target sebesar A (88,00), sehingga capaiannya sebesar 98,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat area-area perbaikan yang masih perlu

dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, capaian terhadap target yaitu sebesar 100,97%, sedangkan pada tahun 2022 hanya mencapai 98,33%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain adanya target yang tidak tercapai dan/atau tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, serta adanya keterlambatan penyampaian Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 kepada Direktorat PSMK, sehingga atas keterlambatan tersebut mengakibatkan penilaian sub komponen tingkat pemanfaatan LAKIN menjadi sangat rendah.

Untuk memperbaiki capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan melakukan hal-hal yang merupakan rekomendasi perbaikan dari Insektorat Utama, antara lain sebagai berikut:

c. Pengukuran Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk melaksanakan monitoring pencapaian kinerja Eselon III, IV, dan individu secara berkala.

d. Pelaporan Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan meningkatkan kualitas penyajian LAKIN dengan: menyampaikan LAKIN kepada Direktorat PSMK secara tepat waktu; menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja; meningkatkan kualitas informasi mengenai perbandingan antara realisasi tahun berjalan dengan target tahun periode akhir Renstra untuk seluruh indikator kinerja; menyajikan informasi keuangan baik anggaran maupun realisasi yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran dan kinerja tertentu; dan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang dikuantifikasikan untuk seluruh indikator kinerja

e. Capaian Kinerja

Meningkatkan kinerja sehingga seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai an meningkatkan capaian kinerja tahun berjalan agar lebih baik dari capaian tahun sebelumnya

- f. Mendokumentasikan proses tindak lanjut dari rekomendasi sehingga menunjukkan perubahan sebelum dan sesudah adanya tindak lanjut serta menyampaikan dokumen tindak lanjut kepada Itama

Terhadap beberapa rekomendasi tersebut, juga telah dilaksanakan dalam penyusunan LAKIN Tahun 2022 ini.

Realisasi IKU Hasil Evaluasi AKIP telah mencapai 96,09% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

### **IKU 9 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Penjelasan dari Indikator ini adalah pemanfaatan secara optimal dari penggunaan layanan TI yang disediakan oleh Biro TI. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Target yang direncanakan adalah sebesar 96,00%.

Komponen penilaian dari IKU ini adalah sebagai berikut:

- a) Sub IKU 9.1 Tingkat pemanfaatan layanan SISDM (20%). Terdiri dari jumlah pemutakhiran riwayat LHKPN, jumlah pemutakhiran Riwayat SPT, jumlah pemutakhiran riwayat pendidikan dinas, jumlah pemutakhiran informasi pegawai, dan jumlah pemutakhiran riwayat tempat tinggal/domisili ;

- b) Sub IKU 9.2 Tingkat pemanfaatan layanan JASMIN (15%). Terdiri dari jumlah *log access* Aplikasi JASMIN dan jumlah tindak lanjut atas surat masuk;
- c) Sub IKU 9.3 Tingkat pemanfaatan layanan SMP (20%). Terdiri dari jumlah LHP terinci yang diinput ke SMP dan *softcopy* LHP terinci yang diunggah ke SMP;
- d) Sub IKU 9.4 Tingkat pemanfaatan layanan SiAP (20%), merupakan jumlah aktivitas minimum pemeriksa per tahun dibandingkan dengan jumlah pemeriksa per tahun;
- e) Sub IKU 9.5 Tingkat pemanfaatan layanan SIPTL (25%), merupakan jumlah bahan TL yang memiliki status *read* dibandingkan dengan jumlah bahan TL yang dikirimkan oleh entitas;

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi  
Tahun 2020 - 2024**

IKU. 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	100,00%
Realisasi	99,62%	99,62%	94,41%		
Capaian	104,86%	103,77%	97,33%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			94,41%		

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 adalah sebesar 94,41% dari target sebesar 97,00%, sehingga capaiannya sebesar 97,33%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat pegawai yang belum melaksanakan pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya melaksanakan pemanfaatan/penggunaan lima aplikasi dimaksud. Realisasi tersebut diperoleh dari data pemanfaatan TI yang diambil dari <https://bidics-ssa.bpk.go.id/> (diunduh pada 30 Januari 2023 pukul 14.00 WITA) sebagai berikut:

No	Sub IKU	Persentase
1	Tingkat pemanfaatan layanan SISDM	97,40%
2	Tingkat pemanfaatan layanan JASMIN	83,04%
3	Tingkat pemanfaatan layanan SMP	96,55%

4	Tingkat pemanfaatan layanan SiAP	91,78%
5	Tingkat pemanfaatan layanan SIPTL	99,22%
	<b>Rata-rata</b>	<b>94,41%</b>

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, capaian terhadap target sebesar 103,77%, sedangkan pada tahun 2022 hanya mencapai 97,33%. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan masih adanya pegawai yang tidak memahami perlunya penggunaan suatu aplikasi dan/atau tidak melakukan pemanfaatan aplikasi tersebut.

Untuk memperbaiki capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus berupaya untuk mendorong para pegawai dalam meningkatkan penggunaan pemanfaatan layanan dasar, layanan aplikasi umum, dan layanan aplikasi pemeriksaan, serta mengelola layanan aplikasi manajemen pengetahuan melalui sosialisasi dan pendampingan (bila diperlukan) di BPK Perwakilan; dan
- b. Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mensosialisasikan penilaian terkait IKU ini, sehingga seluruh pegawai memahami perlunya pemanfaatan TI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan terdorong berpartisipasi untuk pencapaian IKU ini

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi telah mencapai 94,41% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

### **IKU 10 – Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Penjelasan dari Indikator ini adalah Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode – metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Formula yang digunakan dalam IKU ini adalah berdasarkan usulan BP yang disusun, jumlah BPK yang diterapkan dan jumlah aktivitas BP yang dilaksanakan.

IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan ini diukur melalui dua Sub IKU yaitu:

- a. Sub IKU 10.1 Tingkat Penyusunan/Penerapan Best Practice. Pencapaian Sub IKU ini diukur dengan jumlah Usulan *Best Practice* yang diterima atau jumlah *Best Practice* yang diterapkan/*replikasi*; dan
- b. Sub IKU 10.2 Tingkat Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan. Pencapaian Sub IKU ini diukur dengan jumlah aktivitas manajemen pengetahuan dibandingkan target aktivitas sesuai rencana aksi pencapaian IKU.

Bobot masing-masing sub IKU tersebut adalah 50%, sehingga jika dikumulatikan menjadi skor IKU 10.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 - 2024**

IKU. 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	50,00%	0,00%	105,70%		
Capaian	50,00%	0,00%	105,70%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			105,70%		

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2022 adalah sebesar 105,70% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 105,70%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menempatkan Manajemen Pengetahuan sebagai salahsatu kegiatan yang sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan kegiatan Manajemen Pengetahuan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Usulan *Best Practice* berjudul “Aplikasi Persuratan dalam Portal Perwakilan (ANDAL)”. Namun demikian, usulan tersebut tidak diterima oleh Direktorat PSMK;
- b. Penerapan/ Replikasi *Best Practice* berjudul “Pendampingan dan Pengenalan Lingkungan Kantor Perwakilan bagi Pegawai Baru dan/atau Pegawai Pindah”;
- c. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Diklat, yaitu pelaksanaan Diklat Pemeriksaan LKPD pada tanggal 24 s.d. 26 dan 28 Januari 2022
- d. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Forum Berbagi Pengetahuan, yaitu KTF Teknik Pengolahan Data Simda Keuangan dan Simda BMD dan Pengenalan Aplikasi Justproli pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal 31 Januari 2022;
- e. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Forum Berbagi Pengetahuan, yaitu KTF Pemeriksaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Serta Peralatan dan Mesin Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal 04 Februari 2022;

- f. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Forum Berbagi Pengetahuan, yaitu KTF Pemeriksaan Kas, Pendapatan, Piutang, Dana Bos dan BLUD pada Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal 04 Februari 2022;
- g. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Forum Berbagi Pengetahuan, yaitu KTF Pemeriksaan Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Jasa Kantor pada Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal 02 Februari 2022;
- h. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Forum Berbagi Pengetahuan, yaitu KTF Pemeriksaan Persediaan, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Barang dan Jasa pada tanggal 02 Februari 2022;
- i. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Komunitas Praktisi, yaitu *Community of Practice* Penyusunan Program Pemeriksaan LKPD pada Triwulan III 2022;
- j. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Evaluasi Kegiatan, yaitu Evaluasi atas Kegiatan Pembinaan CPNS pada tanggal 3 s.d. 6 Oktober 2022; dan
- k. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan berupa Mentoring, yaitu mentoring pada kegiatan *On the Job Training* JFPAP Tahun 2023 pada Triwulan IV 2022.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya IKU ini sama sekali tidak tercapai (0%). Ketercapaian IKU 10 pada tahun 2022 ini didukung oleh peran Manajemen dalam hal ini Para Pejabat Struktural dan Agen Manajemen Pengetahuan yang terus mendorong pelaksanaan berbagai jenis kegiatan manajemen pengetahuan.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berupaya terus berkomitmen melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dengan berbagai jenis aktivitas manajemen pengetahuan, Menyusun usulan *Best Practice* baru dan mendokumentasikannya dalam setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau mereplikasi *Best Practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### **IKU 11 – Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi**

Indikator ini merupakan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Adapun Skala hasil survei adalah sebagai berikut:

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan..

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 - 2024**

IKU. 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,85	3,80	3,94	4,00
Realisasi	3,66	3,89	3,94		
Capaian	96,32%	105,00%	103,68%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			98,50%		

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2022 adalah sebesar 3,94 dari target sebesar 3,80, sehingga capaiannya sebesar 103,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum Para Pemangku Kepentingan

atas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah masih puas dengan kualitas komunikasi yang ada. Realisasi tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan oleh pihak eksternal.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, skor yang diperoleh sebesar 3,89, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 3,94. Ketercapaian tersebut didukung oleh keberhasilan Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjembatani hubungan baik antara. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dengan para stakeholdersnya.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah kedepan akan terus melakukan upaya perbaikan atas kualitas komunikasi kepada para pemangku kepentingan dan terus menyiapkan berbagai macam saluran layanan baik secara langsung melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) maupun melalui platform media social.

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi telah mencapai 98,50% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada Tahun 2024.

## **IKU 12 – Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Indikator ini membahas pemenuhan pengembangan kompetensi pada setiap pegawai agar mendapatkan pelatihan yang tepat dan memadai. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- a) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- b) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014);
- c) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30

September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

**Tabel Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020 - 2024**

IKU. 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	98,82%	100,00%	100,00%		
Capaian	98,82%	100,00%	100,00%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,00%		

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100,00% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100,00%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya penuh untuk pemenuhan pengembangan kompetensi bagi seluruh pegawai. Realisasi 100% tersebut diperoleh dari terpenuhinya standar minimal pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh 90 pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini Subbagian SDM yang selalu mendorong dan secara rutin menawarkan Diklat yang disediakan oleh Badan Diklat PKN BPK RI.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan berkomitmen untuk kedepannya terus melakukan monitoring terhadap pemenuhan pengembangan kompetensi tiap pegawai, menginventarisir diklat yang dibutuhkan oleh pegawai, dan mendorong apabila terdapat pegawai yang belum melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi dalam tahun tersebut.

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### **IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran**

IKU ini yang merupakan Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu: Penyerapan anggaran, Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, Pencapaian keluaran dan Efisiensi.

Sedangkan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) adalah rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Satuan Kerja yang memiliki DIPA mandiri berdasarkan PMK 195 Tahun 2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat delapan indikator kinerja dalam pengukuran EPA, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, data kontrak, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, penyerahan anggaran, dan capaian output.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan.

IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran ini diukur melalui dua Sub IKU yaitu:

- a. Sub IKU 13.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), dengan bobot 60%; dan

- b. Sub IKU 13.2 Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan bobot 40%.

Tabel Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020 - 2024

IKU. 10 Tingkat Kinerja Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87,00%	87,50%	88,00%	88,50%	89,00%
Realisasi	93,37%	89,65%	89,70%		
Capaian	105,00%	102,46%	101,93%		
Persentase Realisasi Tahun 2022 terhadap Target Tahun 2024			100,79%		

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2022 adalah sebesar 89,70% dari target sebesar 88,00%, sehingga capaiannya sebesar 101,93%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya terus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan. Realisasi tersebut diperoleh dari hasil penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 116/ND/X/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 memperoleh rata-rata sebesar 86,98;
- b. Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dari Biro Keuangan memperoleh skor akhir (setelah konversi) sebesar 93,78;

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi 0,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya IKU ini tercapai sebesar 89,65%. Ketercapaian IKU ini didukung oleh peran Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengawal pelaksanaan anggaran dan mendorong pencapaian output dan optimalisasi anggaran sehingga seluruh rencana kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus berupaya untuk merencanakan dan

melaksanakan anggaran dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas sehingga dapat dicapai hasil yang optimal.

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran telah melebihi target Tahun 2024. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

### C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antara lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN, efisiensi anggaran, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

#### a. Pemanfaatan teknologi informasi

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi SiAP (Sistem Aplikasi Pemeriksaan) Pengoptimalan aplikasi ini bermanfaat dalam menghemat anggaran biaya perjalanan dinas dan mempermudah pemerolehan keyakinan mutu atas setiap tahapan pemeriksaan oleh PFP, terstandar serta diperolehnya keyakinan yang memadai bahwa setiap prosedur pemeriksaan telah dilaksanakan.

Selain itu, perubahan metodologi pemantauan TLRHP yang semula secara manual menjadi sistem informasi berbasis web yaitu Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Manfaat yang diperoleh antara lain penghematan anggaran perjalanan dinas dan belanja barang, fleksibilitas waktu validasi dan persetujuan status TLRHP secara berjenjang, serta pemantauan TLRHP bersifat *realtime*.

Disamping itu, penggunaan media zoom untuk melaksanakan rapat, seperti kegiatan *entry meeting* serentak, yang dapat mengurangi belanja jamuan rapat.

b. Pengelolaan BMN

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi. Selain penghapusan BMN karena statusnya rusak berat, penghapusan BMN tertentu juga untuk mengurangi biaya pemeliharaan. Pada tahun 2022, dilaksanakan penghapusan dengan total 25 item BMN.

c. Efisiensi Penggunaan Anggaran

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengendalian belanja operasional yaitu belanja paket meeting (konsinyering) di luar kantor. Pada tahun 2022, seharusnya direncanakan 2 kali pelaksanaan konsinyering, yaitu untuk Pemeriksaan LKPD pada Semester I dan untuk Pemeriksaan Kinerja dan PDDT Semester, namun yang dilaksanakan hanya Konsinyering Pemeriksaan LKPD pada Semester I.

Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga melaksanakan optimalisasi anggaran sehingga dapat melakukan penambahan obyek pemeriksaan, dari target awal 19 LHP menjadi 27 LHP.

#### D. Perubahan Budaya Kerja

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan semboyan pengembangan budaya kerja dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu “BPK SULTENG NAPANDE”.

“BPK Sulteng” adalah singkatan dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan “Napande” berasal dari Bahasa Kaili (bahasa yang digunakan oleh etnik Kaili di Sulawesi Tengah), yang berarti unggul, ahli/kompeten. Napande juga merupakan akronim dari **Netral**, **PANdai**, **DEdikasi**. Kontekstualnya sehubungan pelaksanaan budaya kerja dan nilai-nilai dasar BPK adalah sebagai berikut:

- **Netral** diartikan sebagai pola pikir pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi pegawai yang independen/tidak memihak.

- **Pandai** diartikan sebagai komitmen pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi manusia pembelajar dengan mengembangkan profesionalisme dan kompetensi.
- **Dedikasi** diartikan sebagai semangat pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk senantiasa mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan.

Penetapan “BPK SULTENG NAPANDE” dituangkan dalam Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 17c/K/XIX.PLU/02/2021 tanggal 23 Februari 2021. Belum terdapat perubahan semboyan budaya kerja “BPK SULTENG NAPANDE” dan hingga saat ini semboyan tersebut terus digaungkan dan ditanamkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

## E. Realisasi Anggaran

Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki target output sebesar 345 output, dan mengelola anggaran DIPA sebesar Rp22.116.092.000,00. Adapun rincian realisasi keluaran dan realisasi anggaran sebagai berikut.

Program/ Kegiatan/ KRO/ RO	Volume Keluaran			Realisasi Anggaran		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara	345	345		22,116,092,000	22,073,750,853	99.81 %
CL1043 Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	345	345		22,116,092,000	22,073,750,853	99.81 %
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal				11,209,507,000	11,180,091,532	99.74 %
EBA.994 Layanan Perkantoran	1	1	100.00%	11,209,507,000	11,180,091,532	99.74 %
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal				796,754,000	791,350,620	99.32 %
EBB.951 Layanan Sarana Internal	67	67	100.00%	716,754,000	713,515,620	99.55 %
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	1	1	100.00%	80,000,000	77,835,000	97.29 %
FAF Pemeriksaan Keuangan Negara				10,109,831,000	10,102,308,701	99.93 %
FAF.051 UHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan	118	118	100.00%	62,158,000	62,147,200	99.98 %
FAF.059 UHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	1	1	100.00%	446,024,000	446,022,500	100.00 %
FAF.083 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	100.00%	9,274,000	9,273,691	100.00 %
FAF.091 Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	100.00%	106,544,000	106,526,543	99.98 %
FAF.099 Laporan Profil Entitas Perwakilan	14	14	100.00%	6,484,000	6,475,000	99.86 %
FAF.116 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan	28	28	100.00%	102,107,000	102,082,500	99.98 %
FAF.124 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan	28	28	100.00%	285,710,000	285,207,321	99.82 %
FAF.174 Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12	12	100.00%	698,862,000	698,035,102	99.88 %
FAF.175 Layanan Manajemen Internal Perwakilan	20	20	100.00%	1,737,269,000	1,734,407,562	99.84 %
FAF.U35 UHP BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	26	26	100.00%	4,009,481,000	4,006,214,640	99.92 %
FAF.U83 UHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	26	26	100.00%	2,645,918,000	2,645,916,642	100.00 %

Sampai dengan 31 Desember 2022, dari target 345 Output, yang telah terealisasi sebanyak 345 output atau 100,00% dari total output dan anggaran telah terealisasi sebesar Rp22.073.750.853,00 atau sebesar 99,81% dari total anggaran Rp22.116.092.000,00.

Penyusunan LAKIN belum dapat menginformasikan realisasi anggaran per jenis IKU. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat PSMK, untuk IKU berdasarkan Renstra 2020-2024 belum terdapat *mapping* ke anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja baik dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPK RI Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh capaian skor kinerja sebesar **98,14**. Skor tersebut mengalami peningkatan sebesar **3,84** poin dibandingkan tahun 2021 dengan skor kinerja sebesar 94,3. Komitmen yang kuat untuk mencapai kinerja yang maksimal tergambar pada capaian indikator kinerja yang sesuai target, yaitu:

1. IKU 2 – Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
2. IKU 5 - Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan; dan
3. IKU 12 - Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi.

Selain itu, berkat kerja sama dan upaya keras yang dilakukan segenap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat lima IKU yang melampaui target, yaitu:

1. IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
2. IKU 6 - Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
3. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
4. IKU 11 - Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi; dan
5. IKU 13 - Tingkat Kinerja Anggaran.

Sedangkan IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, yaitu:

1. IKU 1 – Pemenuhan Pengendalian dan Pemrolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
4. IKU 8 - Hasil Evaluasi AKIP; dan
5. IKU 9 - Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Atas indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan langkah-langkah atau rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas LHP dengan intensif melakukan *cross review* antar tim pemeriksa serta tetap membentuk tim *cross review* dari pegawai penunjang/pendukung sehingga dapat memaksimalkan penilaian atas evaluasi akurasi dan konsistensi untuk setiap LHP yang diterbitkan;
2. berperan aktif dalam mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan mengidentifikasi kendala dalam penyelesaian tindak lanjut serta melakukan pembahasan bersama entitas atas Langkah selanjutnya yang perlu diambil. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan terus mensosialisasikan pemanfaatan Aplikasi SIPTL dalam pemutakhiran penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. Melaksanakan internalisasi atas Visi Misi dan Nilai Dasar BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Melaksanakan rekomendasi perbaikan Inspektorat Utama atas Akuntabilitas Kinerja tahun berjalan; serta
5. mendorong para pegawai dalam meningkatkan penggunaan pemanfaatan layanan TI yang ada di BPK, serta melakukan pendampingan (bila diperlukan);

Dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja di masa mendatang, unit/satuan kerja akan melakukan langkah-langkah strategis dengan selalu berupaya untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pencapaian IKU Tahun sebelumnya sehingga target pada masa yang akan datang dapat tercapai.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME**



# BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Riyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.

Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA., CFA.

Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara VI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

**ESELON I**  
SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

**ESELON II**  
SASARAN KEGIATAN

Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

SASARAN

Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

## INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi Rp20.407.366.000	1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
• Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas Rp8.585.723.000	2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
• Meningkatkan Layanan Pemeriksaan Rp11.821.643.000	3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8 Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)
	9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%
	10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13 Tingkat Kinerja Anggaran	88%

Jakarta, Desember 2021

**Pihak Kedua,**

**Pihak Pertama,**

**Dr. Dori Santosa, S.E., M.M., CSFA.,  
CFrA.**

**Slamet Riyadi, S.E., M.M., Ak., CA.,  
CSFA.**

Diketahui oleh:  
**Anggota VI BPK,**

**Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.**

**Wakil Ketua BPK,**

**Ketua BPK,**

**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,  
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.**

**Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.,  
CFrA., CGCAE., QGIA.**

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

**Unit/Satuan Kerja : Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Tahun : 2022**

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Strategi 2	Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif							
Sasaran	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi							
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	-	40%	40%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)</li> <li>Meningkatkan QC dari PT, WPI, dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD atas 14 entitas dan Kinerja 1 entitas</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP)</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan QC dari PT, WPJ, dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester II</li> </ul>
								Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci Kinerja 4 entitas dan 1 PDDT</li> </ul>
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan LHP dengan simpulan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2)</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan LHP dengan simpulan sesuai dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2)</li> </ul>
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk semester I</li> </ul> Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan bahan dalam rangka Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) untuk semester I</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL</li> <li>Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL</li> </ul>
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Nasional</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Nasional							
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	Desember	Triwulan I s.d IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peninjauan atas permintaan pemeriksaan oleh lembaga perwakilan atau IPH dan melaporkan ke BPK Pusat(bila terdapat permintaan pemeriksaan)</li> <li>Melakukan revisi RKP bila permintaan pemerikaan disetujui</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan</li> </ul>
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	-	-	-	100%	Desember	Triwulan II: <ul style="list-style-type: none"> <li>Merumuskan pemeriksaan tematik lokal yang sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK dan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau menjadi tujuan pembangunan daerah</li> <li>Menyusun tim Pemeriksaan Tematik Lokal</li> <li>Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik lokal</li> </ul> Triwulan III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal</li> </ul> Triwulan IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan Pemeriksaan Tematik Lokal</li> </ul>
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)	-	-	-	Sangat Memuaskan (5,00)	Desember	Triwulan I s.d. III: <ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring data pegawai pemeriksa yang memiliki hubungan kepentingan dengan entitas pemeriksaan dan monitoring penugasan pemeriksaan pada setiap pemeriksa tidak lebih dari tiga kali berturut di entitas yang sama sebagai bahan pertimbangan penugasan pemeriksaan LKPD.</li> <li>Pengarahan Kepala Perwakilan terkait IIP</li> <li>Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait visi misi dan nilai dasar BPK serta budaya kerja</li> </ul>
								Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> <li>Menginformasikan kepada responden untuk mengisi kuesioner terkait implementasi nilai dasar BPK</li> </ul>
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (88,00)	-	-	-	A (88,00)	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2022</li> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> </ul> Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja				Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> </ul> Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan berlaku</li> <li>• Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III 2022 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasar hasil evaluasi</li> </ul>
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	97%	97%	97%	97%	97%	Desember	Triwulan I s.d. IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan mendorong melaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SIAP LK, SIAP Banparpol)</li> <li>• Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan</li> <li>• Memaksimalkan pemanfaatan aplikasi internal BPK (SMP, SIAP, portal eAudit, SIPTL dan penggunaan Big Data Analytics), SISDM, Kelola Tugas, Prisma SKP, JASMIN</li> </ul>
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	25%	50%	100%	Desember	Triwulan I <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Penerapan <i>Best Practice</i> tahun 2021</li> <li>• Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan</li> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: Diklat</li> </ul> Triwulan II <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: Forum berbagi pengetahuan</li> </ul> Triwulan III <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: <i>Coaching</i> dan Mentoring</li> </ul> Triwulan IV <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan: Evaluasi Kegiatan</li> </ul>
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)	-	-	-	Memuaskan (3,80)	Desember	Triwulan I s.d. III: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit</li> </ul> Triwulan IV:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit</li> <li>Melakukan survei kepada para pemangku kepentingan terkait kepuasan mereka terhadap hubungan kerjasama dan komunikasi dengan perwakilan</li> </ul>
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	10%	20%	60%	60%	60%	70%	70%	80%	80%	90%	100%	100%	Desember	<p>Januari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai.</li> <li>Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai</li> </ul> <p>Februari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Maret :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Menginventarisir kebutuhan angka kredit dan jam diklat</li> </ul> <p>April :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Mei :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Juni :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> <li>Menginventarisir kebutuhan angka kredit dan jam diklat</li> </ul> <p>Juli :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>Agustus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> <p>September :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2022	Rencana Pencapaian Kinerja												Rencana Waktu Penyelesaian	Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP
			TW I			TW II			TW III			TW IV				
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)			(8)	(9)
																<ul style="list-style-type: none"> <li>Menginventarisir kebutuhan angka kredit dan jam diklat Oktober :</li> <li>Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> November : <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul> Desember : <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat.</li> </ul>
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	99%	99%			99%			99%			99%			Desember	Triwulan I: <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2021 dan Kebijakan TA. 2022</li> <li>Menyusun data capaian output.</li> <li>Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran</li> </ul>
																Triwulan II s.d. IV: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun data capaian output.</li> <li>Menyusun dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran</li> </ul>